

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI 11 BANCAH KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Putri Pesi^{1(a)}, Dasman Lanin^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}putripesi551@gmail.com, ^{b)}dasman@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

24-04-2022

Selesai Revisi:

04-06-2022

Diterbitkan Online:

27-06-2022

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar;

Keywords:

Implementation; Smart Indonesia Card;

Corresponding Author:

putripesi551@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, dimana pemilihan informan didasarkan pada karakteristik tertentu. Adapun untuk teknik pengumpulan data melalui suatu penelitian lapangan berupa jenis tanya jawab dari Guru BK dan orang tua siswa. Kemudian observasi serta dengan studi dokumentasi. Jumlah yang menjadi sumber data terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK dan 4 orang tua siswa. Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Hasil kajian memperlihatkan jika dari tempat penelitian KIP yang telah memenuhi target, karena penempatan siswa penerima KIP sudah tepat dan tepat sasaran. Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dalam menjalankannya, karakteristik agen telah dengan penugasan yang penuh dengan ditetapkannya keadaan berprestasi tidak cukup dengan sekitar dan partisipan merespon terhadap anak yang menerima KIP.

ABSTRACT

From This study aims to analyze the implementation of the Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) policy at SD Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok South. Informants in this study were determined by purposive sampling method, where the selection of informants was based on certain characteristics. As for the technique of collecting data through a field research in the form of semi-structured interviews addressed to the Principal, BK teachers and parents of students. then observation and documentation study. The number of data sources consists of the Principal, Counseling Teacher and 4 parents of students. The research location was carried out at SDN 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. The results of this study indicate that the implementation of the Program kartu Indonesia Pintar (PIP) at SD Negeri 11 Bancah Koto Parik Gadang Diateh has been going well. This can be seen from the variable implementation of the KIP policy that has met the target, because the determination of KIP recipient students is right and on target. Sufficient and competent human resources in running it, the characteristics have carried out responsibilities in accordance with the rules that have been set. The economic condition of parents whose income is insufficient, while the social environment for the participation and response of parents of students who are very enthusiastic about their children as KIP recipients.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.10>



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang terdiri dari masyarakat dan individu serta komunitas nasional. Pendidikan ialah proses yang dibutuhkan dalam mencapai suatu keseimbangan serta peningkatan perkembangan pribadi dan sosial (Nurkholis, 2013). Rangka untuk meratakan media dan peluang pendidikan, dijelaskan dari Undang-Undang 4 Sistem Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2003. Wajib belajar merupakan suatu rencana pendidikan yang harus dijalani dan menjadi tanggungan pemerintah.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah ada kebijakan dengan mewajibkan belajar sembilan tahun. Hal ini merupakan yang umum dengan adanya bantuan. Mereka yang tidak sanggup membayar untuk kondisi tersebut.

Selain itu, pada masa kepresidenan Joko Widodo pada tahun 2014, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang meliputi pelaksanaan Rencana Tabungan Keluarga Sejahtera (PSKS), Rencana Indonesia Pintar (PIP) dan Rencana Indonesia Sehat (PIS). keluarga yang produktif. Aturan yang memperkuat arahan yang ada.

Program Indonesia Pintar ialah suatu program prioritas Presiden Joko Widodo. Hal ini didedikasikan dalam bantuan untuk terus mendapatkan suatu layanan pendidikan hingga mereka lulus dari sekolah menengah atau sederajat. Program Indonesia Pintar juga dalam rangka mengurangi biaya pendidikan menengah, menjadi dorongan untuk lanjut sekolah, dengan diterbitkan KKS bagi anak-anak dalam Program Indonesia Pintar.

Kebijakan KIP dengan nauangan menteri pendidikan. Adapun untuk tujuan dari rencana tersebut ialah dalam rangka membantu siswa miskin, agar mendapatkan suatu pendidikan yang layak, dan mencegah anak-anak putus sekolah serta memenuhi suatu kebutuhan sekolah mereka. Siswa harus menggunakan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah, misalnya untuk perlengkapan sekolah, dan biaya transportasi siswa ke sekolah, serta uang saku. Dengan kartu pintar Indonesia, tidak terdapat lagi siswa yang putus sekolah karena kekurangan dana. Diperuntukan pada pendanaan yang ada dengan program di lapangan (TNP2K, 2016). Program Indonesia Pintar ialah suatu bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa SD, kemudian SMP, selanjutnya SMA/SMK serta

sederajat dari keluarga miskin, termasuk siswa reguler dan reguler. Dalam mengimplementasikan program kartu indonesia pintar, Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang akan menerapkan kebijakan tersebut.

Kabupaten Solok Selatan ialah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan proporsi penduduk putus sekolah yang cukup tinggi. Untuk tahun 2019, penduduk laki-laki menyumbang 30,26%, dan penduduk perempuan menyumbang 24,36% tanpa melanjutkan pendidikan. Dilihat dari data kependudukan kasus Solok Selatan, banyak kabupaten yang akan menerapkan rencana kebijakan Indonesia Pintar, salah satunya adalah kabupaten Koto Parik Gadang Diateh.

Kecamatan Koto Parik Gadang diateh ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Untuk kecamatan ini ada 22 SD, salah satunya SDN 11 Bancah. Untuk SDN 11 Bancah merupakan salah satu sekolah yang telah memperoleh Kartu Indonesia Pintar yang berisi 100 siswa miskin. Setiap siswa di sekolah ini menerima bantuan 450.000 per tahun, serta 225.000 per semester. Siswa menggunakan dana tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah, termasuk alat tulis, kemudian tas sekolah serta sepatu sekolah. Siswa ini mendapatkan bantuan dari KIP menjadi dorongan untuk sekolah, menerapkannya dalam operasionalnya.

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Koto Parik Gadang diateh, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk menentukan siswa yang dapat menerima PIP masih kurang akurat. sehingga masih ada kesulitan keuangan Siswa tidak bisa mendapatkan PIP. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kurang lebih 100 siswa layak mendapatkan bantuan PIP, namun hanya 49 siswa yang dinyatakan telah menerima PIP dari sekolah. Padahal untuk keuangan 51 orang tua siswa sulit, sangat layak untuk menerima bantuan dari PIP. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa. Informasi yang didapat adalah PIP tidak disosialisasikan dengan informasi adanya bantuan PIP semacam ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk rumusan masalah.dalam penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 11.

METODE PENELITIAN

Kajian ini ialah analisis dari kualitatif. Bentuk data menggunakan data primer serta data sekunder. Untuk informan penelitian ditentukan melalui suatu metode *purposive sampling*, dimana untuk pemilihan informan dilaksanakan berdasarkan suatu karakteristik tertentu. Adapun untuk Teknik pengumpulan data melalui suatu penelitian lapangan berupa jenis tanya jawab orang tua, observasi dari tempat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerima kartu Indonesia. pintar ialah pelajar dari keluarga yang dana pendidikannya masih di bawah tingkat kepatuhan. Dengan kartu Indonesia pintar, siswa dapat sejahtera dan berkembang, dan juga dapat menutupi kekurangan uang jajan dan kekurangan perlengkapan sekolah ketika terjadi kekurangan.

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan kepada siswa yang kurang mampu, siswa di sekolah, atau siswa dengan membantu yang masuk dan menjadi jaminan sekolah tak ada SPP. Pemerintah menurunkan bantuan pendidikan berwujud KIP terhadap anak-anak miskin yang terpapar putus sekolah hingga dapat menutupi kebutuhan pembelajaran mereka. Penjatahan dana bantuan sebesar 450 ribu per/tahun dan ada pula 225 ribu per/semester ditujukan mendapatkan kebutuhan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, transportasi, dan saku, dan lain-lainnya.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak miskin yang rentan putus sekolah dalam bentuk KIP. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Alokasi dana bantuan ini sebesar Rp. Rp 450.000.000,00 per tahun dan Rp 225.000 per semester digunakan pada keperluan kelengkapannya.

Dalam Realisasi Kartu Indonesia Pintar peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mana dengan enam sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana serta kondisi sosial politik & ekonomi.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sebaiknya, ia harus mempunyai arah yang tepat. Para pelaksana mungkin lebih mudah

mengimplementasikan kebijakan. Pada saat yang sama, menurut Van Horn dan Van Mitte, ketika menetapkan standar dan tujuan, jangan terlalu idealis, karena ini akan mempersulit implementasi kebijakan. Adapun studi di atas, standar kebijakan bervariasi tergantung pada bidang di mana mereka terlibat.

Hal ini tidak membuat suatu standar kebijakan untuk kehilangan kejelasan, sebab perbedaan standar. didalam kebijakan program kartu indonesia pintar dapat dipadukan dengan suatu pedoman SOP yang berlaku untuk implementasi.

Menurut Edward III yang dirangkum oleh (Hayatullah & Takdir, 2015) mengatakan bahwa SOP kemungkinan akan menjadi penghambat implementasi kebijakan baru, membutuhkan metode baru atau jenis personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, semakin banyak kebijakan yang memerlukan perubahan dalam organisasi dengan cara yang biasa, semakin besar kemungkinan prosedur operasi standar akan menghambat implementasi. Padahal, kebijakan program Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan di sekolah tempat penelitian sudah dilaksanakan, sebab berpedoman berdasarkan SOP. Untuk semua niat kebijakan dapat tercapai meskipun dengan suatu standar kebijakan yang berbeda. Untuk tujuan kebijakan sasaran program kartu Indonesia pintar ialah sama, sebab ini untuk anak sekolah dan anak yatim piatu yang tidak mampu membayar.

Sumber Daya

Sumber daya dalam sprti ini ada dua bidang, yakni sumber daya makhluk dan sumber daya keuangan. Menurut pengkajian penelitian, untuk manusia serta keuangan terkait dengan standar dan tujuan kebijakan. Sebab didalam analisis akhir, perwujudan standar yang mempunyai ialah untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dan dioperasikan oleh seorang pelaksana.

Implementasi Kebijakan Rencana Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kartu Indonesia pintar ialah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang telah terpenuhi dalam rencana yang dilaksanakan di tempat peneliti teliti. Hal ini hanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang dapat menerapkan kebijakan secara penuh dan benar. Oleh karena itu, dari hasil survei di atas, sekolah

yang teliti telah memiliki suatu sumber daya yang berkualitas tinggi.

Karena jika sekolah tersebut kekurangan sumber daya yang berkualitas, bisa jadi karena kurangnya sumber dana yang mendukung. Hal demikian untuk sumber daya manusia serta sumber daya finansial telah terpenuhi.

Komunikasi Antar Organisasi

Dalam implementasinya, komunikasi ialah menjadi intinya. Komunikasi yang benar dapat membentuk hubungan kerja yang bagus. Hal ini agar implementasi berupa kebijakan dapat dilaksanakan dengan benar. Lokasi tempat pendidikan ini, proses komunikasi antara pihak sekolah bersama dinas pendidikan dan orangtua pelajar berjalan dengan baik. Penyajian informasi yang terstruktur merupakan faktor penguat yang dinamis untuk komunikasi dan transmisi informasi yang baik. Sehingga akan dapat berkomunikasi dengan lancar.

Seiring dengan kajian yang mengatakan bahwa ada 3 perihal yang mempengaruhi keberhasilan atau baik buruknya sebuah komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan & konsistensi dapat disaksikan dari hubungan baik yang tercipta sesama sekolah dengan Dispen dan wali murid telah membuktikan bahwa memang komunikasi yang berjalan pun sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai komunikasi yang andal.

Kajian yang dirumuskan oleh Eduward, ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidaknya komunikasi, yaitu komunikasi, kejelasan serta koherensi. Terkait kegiatan penguatan aktivitas bahwa pelaksana pada sekolah dasar ini sering bertemu dengan orang tua untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan program Kartu Indonesia Pintar. Sehingga akhirnya, sebagian besar orang tua merasa memahami penjelasan sekolah dan menyampaikan rasa terima kasih untuk sekolah serta terima kasih kepada pemerintah yang memberikan KIP.

Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mendukung karakteristik agen pelaksanaan. Pemerintah telah mengingatkan kepada suatu sekolah agar pemberian suatu dana sesuai dengan suatu sasaran yang ditetapkan. Serta diperlukan untuk pendidikan. Adapun upaya sekolah dalam mengalokasikan dana KIP ialah mengumpulkan data siswa miskin dan mengirimkannya ke pemerintah agar siswa tersebut dapat menerima bantuan.

Intinya untuk agen pelaksana sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Hasil menunjukkan

bahwa sekolah telah memiliki karakteristik yang baik sehingga berpeluang untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan terkait implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi ialah suatu karakter dan karakteristik pelaksanaan serta sikap pelaksana suatu kebijakan, seperti komitmen dan kejujuran. Seorang pelaksana yang baik harus memiliki kepribadian yang baik untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang baik sesuai dengan keinginan dan keputusan para pembuat keputusan. Para pelaksana sekolah tidak menanganinya dengan baik. Kebijakan pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar tidak mengandung unsur kekeluargaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam pelaksanaan KIP tidak terdapat suatu unsur kekerabatan. Semua dikelola berdasarkan yang berhak untuk menerima yaitu anak yatim serta keluarga yang kurang mampu.

Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi

Dalam implementasi kebijakan pada lingkungan sangatlah penting karena menurut Weimer dan Vining sebuah kebijakan harus sama dengan tuntutan lingkungan. Lingkungan ini merangkum sosial politik dan ekonomi. Lingkungan sangat memengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar ini mendukung terhadap implementasi kebijakan.

Hal ini sangat penting ketika menerapkan kebijakan lingkungan. Pendapat Weimer dan Vining, kebijakan harus disamakan dengan persyaratan lingkungan. Yang terdiri dari lingkungan sosial politik dan ekonomi. Dalam pengimplementasian Program Kartu Indonesia Pintar Lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Antusiasme masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini membuktikan hal tersebut. Antusiasme publik semacam ini tidak terlepas dari upaya para pelaksana kebijakan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. Hal seperti ini juga menunjukkan bahwa fisik lingkungan sosial politik dan ekonomi sangat erat kaitannya sama komunikasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah tempat penulis jalani. Hal ini sesuai dengan teori Van Metter dan Van

Horn Intinya adalah implementasi berjalan dengan lancar.

PENUTUP

Implementasi Program KIP dianalisis dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dikemukakan bukti bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan teknik pengumpulan data melalui suatu penelitian lapangan berupa jenis wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada Kepala Sekolah, Guru BK dan orang tua siswa. kemudian observasi serta dengan studi dokumentasi. Jumlah yang menjadi sumber data terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK dan 4 orang tua siswa. Hal ini berdasarkan variable praktek dengan tepat sasaran.

Variabel sumber daya manusianya dengan berkompeten. Pemanfaatan dana yang diberikan kepada siswa melalui rekening dan diawasi oleh orang tua, dimanfaatkan untuk belanja keperluan sekolah anak-anak mereka.

Variable komunikasi dibrbagai organsasi & penguatn aktivits dlm plaksanaan sudah melakukan komunikasi dengan siswa maupun dengan orang tua siswa melalui kegiatan sosialisasi.

Karakteristik agen pelaksana pada implementasi KIP melaksanakan mandatnya penuh tanggung jawab. Dana rata dengan praturan yg ditetpkan, pihak pemerintah mengingatkan kepada pihak sekolah agar pemberian dana tepat sasaran dan digunakan untuk keperluan yang bersangkutan dengan pendidikan.

Kondisi sosial, ekonomi serta politik yang mempengaruhi implementasi KIP ialah dari kondisi ekonomi dan lingkungan sosial orang tua yang berpenghasilan tidak mencukupi, ikut campur dan cara tanggap orang tua yng begitu bersemangat terhadap anknya menjadi pnerima KIP, serta dukungan penuh pelaksanaan PIP oleh elit politik seperti desa, sekolah, dan dinas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S. (2004). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Bumi Aksar).

Adiwinarni, N., Retna Puspita, D., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11.

Anggresu, G., Tulus, F., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).

Dewi Wulansari, E. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*.

Hayatullah, A., & Takdir, M. (2015). Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi*, 6.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Alfabeta).

Nurkholis. (2013). *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. 1(1), 24-44.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional., (2003).

Yohanes Mangara Uli, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*.